

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh diklat, komunikasi organisasi dan disiplin pegawai terhadap kinerja pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah se Priangan Timur. Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah se Priangan Timur, Yakni : 1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang (Jl. Cut Nyak Dhien No.114, Sumedang); 2. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut (Jl. Suherman No. 65 Tarogong Kidul, Garut); 3. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Jl. Raya Karangnunggal Sukaraja Kab. Tasikmalaya); 4. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya (Jl. Ir. H. Juanda (By Pass) Tasikmalaya); 5. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis (Jl. Jendral Sudirman No. 231, Ciamis); 6. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar (Jl. Brigjen M. Isya, Banjar); 7. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran (Jl. Raya Pangandaran Parigi KM. 2 Pangandaran).

3.1.1 Profil Organisasi

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat secara historis diawali dengan unit kerja yang bertugas untuk melakukan Pengurusan Perpajakan dan Pendapatan

Daerah, sebelum Tahun 1971 ditangani oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam lingkungan Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 September dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulai Tahun Anggaran 1972/1973, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan Perpajakan dan Pendapatan Daerah ditangani secara terpisah dari lingkungan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Nomenklatur Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sejak Tahun 1970 Kantor Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat bertempat di Jl. Ir. H. Juanda 37 Bandung. Tahun 1984 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat pindah ke Gedung baru yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta 528 Bandung.

Sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7/DP.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat, mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : Pem. 10/69/40.655 Tanggal 16 Oktober 1979, nomenklatur Dinas Perpajakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tanggal 4 November 1977 Tentang Pedoman Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/7/39126 tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor : 7/PD.040/1978 Tanggal 30 Agustus 1978 yang kemudian diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1990 tanggal 24 Januari 1990.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950), Wilayah Kerja Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, meliputi Wilayah I Banten, Wilayah II Bogor, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Purwakarta, Wilayah V Priangan. Perkembangan selanjutnya, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten , maka Wilayah kerja Pembantu Gubernur Banten terpisah dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Dinas/Badan/Lembaga yang terpisah dari Propinsi Jawa Barat. Begitu pula Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang berlokasi di Wilayah Banten menjadi Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Banten.

Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, secara otomatis yang asalnya membawahi 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, maka sejak terbentuknya Propinsi Banten, menjadi 20 Cabang Dinas Pendapatan.

Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor : 165), maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas/Lembaga/Badan/ dilingkungan Pemerintahan dalam Propinsi Jawa Barat telah diubah berdasar kepada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor : 20 SERI D) Jo. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 9 SERI D).

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, operasionalnya dilaksanakan oleh 34 (tiga puluh empat) Pusat Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Barat, termasuk tujuh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah se Priangan Timur yang berada di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

3.1.2 Program Kerja

Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan.

Kinerja Pendapatan

1. Pelaksanaan Pungutan

a) Intensifikasi

- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan;
- Penyesuaian Struktur Tarif Pajak;
- Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah;
- Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggal;
- Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah.

b) Ekstensifikasi

- Penggalan WP / WR Baru;
- Perluasan Objek Pajak Baru;
- Antisipasi Pungutan Pajak Baru.

c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD

d) Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD

2. Administrasi Pemungutan

1. Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

3. Rekonsiliasi secara Periodik antara Badan Pendapatan, BPKAD, Kas Daerah dan Kab/Kota;
4. Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab/ Kota.

3. Koordinasi

1. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri, Dep. Keuangan, Dep. Energi, DPR RI, dll);
2. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain;
3. Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja;
5. Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab/Kota.

4. Anggaran

1. Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (*Output , Input , Income , Benefit dan Impact*);
2. Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB);
3. Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien dan Akuntabel;
4. Tertib Administrasi Anggaran;
5. Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pembinaan

1. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat);
2. Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik;
3. Pembinaan Disiplin Kerja;

4. Pembinaan Etika Dan Moral PNS;
5. Pembinaan Teknis Operasional Kepada SKPD Penghasil;
6. Pembinaan Teknis Operasional Kepada Dipenda Kabupaten/Kota.

Kinerja Pelayanan

1. Organisasi Dan Tata Kerja

1. Penataan Organisasi dan Uraian Tugas;
2. Perumusan Tata Kerja Dan Mekanisme Kerja;
3. Penyusunan SOP;
4. Penyusunan SPM;
5. Perumusan Typologi PPPD.

2. Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Bermoral Dilakukan :

1. Melaksanakan "*Capacity Building*" di Berbagai Bidang Pendapatan;
2. *Tour Of Duty & Tour Of Area*;
3. Mengembangkan Sistem Karir (*Carrier Planning*);
4. Menumbuhkembangkan Etos Kerja, Budaya Kerja dan Kebanggaan *Exprit de Corp*;
5. Menerapkan Prinsip *Reward and Punishment*;
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

3. Sarana dan Fasilitas Pelayanan

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran;
2. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (Lahan Parkir, Ruang Pelayanan, Ruang Arsip, dll);

3. Pembentukan kantor Bersama/Samsat Pembantu;
4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis IT;
5. Pelaksanaan *Online System* Pajak Se Jawa Barat.

4. Pelayanan Khusus

1. Standar ISO 9001;
2. Pelayanan *Drive Thru*;
3. Pelayanan Gerai Samsat/Samsat Outlet;
4. Layanan SMS;
5. Samsat *Mobile*/Samsat Keliling;
6. Perintisan *Banking System*.

3.1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan pengkajian bahan kajian teknis bidang pelayanan pendapatan, menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional badan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang pelayanan pendapatan, meliputi aspek pendataan dan penetapan, penerimaan dan penagihan, serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah se Priangan Timur.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan;
- b. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi bidang pelayanan pendapatan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPPD.

Rincian Tugas

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja PPPD;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pendapatan;
- c. Menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas, sesuai urusan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pelayanan pendapatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan daerah Provinsi;
- e. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pendapatan daerah Provinsi;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan PPPD;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan keputusan; dan
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jenis pajak yang dikelola langsung oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Barat.

a. Secara Langsung :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Air Permukaan.

b. Bersifat Koordinasi :

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Rokok.

Jenis Pungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

- Sewa Kantin dan Foto Copy;

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

- Sewa Lahan ATM.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan desain deskriptif dan penelaahan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan didasarkan pada persepsi responden untuk menerangkan pengalaman pengalaman dan selanjutnya di analisis menurut desain deskriptif dan kausal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan alat bantu kuesioner tertutup. Dalam hal ini responden hanya

memilih salah satu jawaban yang telah disediakan, dimana alternatif jawaban terdiri dari lima tingkatan dan selanjutnya diterjemahkan dalam skala interval.

3.2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian adalah untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas apa yang dimaksud dengan variabel dalam penelitian ini, indikator dari suatu variabel dan bagaimana cara mengukurnya.

Menurut *Sekaran*, variabel adalah : "Apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau pada waktu yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda"

Dalam penelitian ini definisi operasional yang terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah diklat (X_1), komunikasi organisasi (X_2), dan disiplin (X_3) serta variabel terikatnya adalah kinerja pegawai (Y). Definisi variabel operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Diklat (X_1) : Pelatihan yang mengkhususkan pada pekerjaan pekerjaan yang mendukung kegiatan pegawai secara umum. Penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidangnya.
2. Komunikasi Organisasi (X_2) : Motivasi yang timbul dari para pegawai untuk bekerja di bidangnya. Munculnya rasa tanggung-jawab, keinginan berprestasi, minat atas pekerjaan, hubungan kerja dan penghargaan.
3. Disiplin (X_3) : Disiplin kerja ialah sikap mental yang tercermin dalam

perbuatan atau tingkah laku seseorang, kelompok masyarakat berupa ketaatan (*obedience*) terhadap peraturan, norma yang berlaku dalam masyarakat (*Siagian 2011*). Indikator dari disiplin kerja ialah ketepatan waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab yang tinggi, dan ketaatan terhadap aturan kantor.

4. Kinerja pegawai (Y) : Hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Elemen penilaian yang terdiri atas Kedisiplinan kerja, Sumbangan terhadap kinerja tim, inisiatif, kehadiran dan perilaku di tempat kerja.
5. Karakteristik responden :

Pegawai PPPD yang telah mengikuti diklat Operasional pegawai Bapenda. Tiap tiap variabel pada penelitian ini akan dioperasionalisasikan. Pengukuran yang digunakan akan menghasilkan data dalam bentuk skala interval dan diterapkan pada semua item pertanyaan yang terdiri dari lima alternatif jawaban. Variabel-variabel tersebut nilainya berupa total skor pernyataan yang diperoleh dari pengisian instrumen dari keempat variabel yang disusun dengan indikator indikator seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	No Item	Skala
1	2	3	4	5
Diklat (X ₁)	“Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalisme pegawai. Hal tersebut penting karena cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan kinerjanya.” (Ambar, 2009: 219)	a. Pelaksanaan Diklat b. Evaluasi Diklat c. Implementasi Diklat Ambar T Sulistiyani & Rosidah (2009: 223)	1-8 9-13 14-15	Ordinal
Komunikasi Organisasi (X ₂)	“Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.” (Wiryanto, 2005)	a. Keterbukaan b. Saling Menghormati c. Kesadaran dan pengakuan pentingnya timbal balik d. Media komunikasi yang baik (Ruslan, 2005)	1-4 5-8 9-10 11-12	Ordinal
Disiplin Pegawai (X ₃)	“Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisas.” (Simamora, 2006: 610)	a. Kehadiran b. Ketepatan c. Ketaatan terhadap peraturan d. Ketaatan terhadap prosedur kerja e. Melaksanakan tugas dan kewajiban (Rivai dan Sagala ,2011: 825)	1-3 4-5 6-8 9-10 11-12	Ordinal

Kinerja Pegawai (Y)	“Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama” (Rivai & Basri, 2005: 14)	a. Kualitas pekerjaan	1-3	Ordinal
		b. Kuantitas pekerjaan	4-6	
		c. Ketepatan waktu kerja	7-10	
		d. Kerjasama dengan rekan kerja (Prawirosentono, 2008)	11-12	

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini telah dipahami konteksnya. Dari sisi batasan sumber, data terbagi atas data internal dan eksternal. Dari sisi waktu, data terbagi atas data time series (data yang terdiri dari beberapa interval waktu) dan cross section (data terdiri dari satu interval waktu). Dari sisi sumber, data terbagi atas data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini digunakan skala Likert yang nantinya diterjemahkan ke skala interval agar dapat dikalkulasikan secara statistik. ”Dari sisi skala pengukuran, data yang berbentuk angka terbagi atas skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Skala nominal dan ordinal disebut juga nonmetrik, yaitu data yang tidak dapat dikalkulasikan, sedangkan skala interval dan rasio disebut metrik, dimana angka angka tersebut dapat dikalkulasikan.”

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan teknik wawancara, pengamatan langsung dan juga pengisian kuesioner, dengan terlebih dahulu menentukan instrumennya.

Penelitian memerlukan landasan atau telaahan teori demikian pula dengan pembuatan kuesioner. Langkah langkah penyusunan kuesioner :

1. Menetapkan subyek penelitian (siapa yang melakukan penelitian, apakah organisasi atau individu);
2. Menuliskan permohonan pengisian kuesioner;
3. Menuliskan tata cara pengisian kuesioner;
4. Menetapkan isian pertanyaan dalam kuesioner yang terdiri dari dua bagian, yaitu :
 - a. Karakteristik responden;
 - b. Item item pertanyaan yang dilengkapi dengan kolom isian untuk jawaban, apakah tertutup, semi terbuka, terbuka atau kombinasinya.
5. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner.

Data sekunder juga diambil dari berbagai buku teori, jurnal jurnal, searching website, contoh tesis yang relevan dengan penelitian ini dan buku makalah lainnya yang berhubungan erat dengan variabel variabel dari penelitian ini. Dalam memilih sampel terbanyak adalah yang terbaik diharapkan, namun perlu diperhatikan kaidah-kaidah menetapkan jumlah sampel minimal yang harus dikumpulkan.

3.2.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Se-Priangan Timur. Sampel yang digunakan adalah 139 orang pegawai sebagai responden setelah dikurangi 1 orang sebagai surveyor.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode yang pengambilan sampelnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria penelitian ini adalah para pegawai yang langsung bekerja secara teknis di daerah operasi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Se-Priangan Timur. Sampel yang digunakan adalah semua populasi yaitu 139 orang pegawai Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Se-Priangan Timur.

3.2.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku bacaan, literatur dan catatan-catatan kerja yang berhubungan dengan variabel penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data dan informasi dari obyek penelitian. Beberapa pengumpulan data dari teknik ini antara lain:

- a. Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara langsung oleh pewawancara.
- b. Observasi adalah setiap kegiatan atau teknik pengumpulan data dari obyek yang diteliti pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Se-Priangan Timur dengan maksud mengadakan pencatatan terhadap gejala atau kejadian. Akan tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja pegawai.
- c. Angket/kuesioner yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden sekitar masalah yang akan diteliti dengan alternatif jawaban.
- d. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mempelajari laporan-laporan dan dokumen-dokumen instansi yang berhubungan dengan instansi.

3.2.2.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul adalah memberi kode atau disebut pula koding, dengan menetapkan skor bobot nilai pada hasil jawaban angket, langkah terakhir untuk mempermudah proses pengelolaan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel (Tabulasi Data) berupa daftar skor jawaban angket dari setiap

variabel jawaban yang tidak mendukung (pertanyaan negatif). Untuk lebih jelasnya kita akan melihat bobot nilai dari setiap alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2007: 87).

Tabel 3.2
Kriteria Pemberian Skor Atas Jawaban Responden

Pernyataan	Alternatif Jawaban Positif	Alternatif Jawaban Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Ragu – ragu	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat tidak setuju	1	5

Pengukuran untuk masing-masing item pernyataan menggunakan rumus:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah persentase jawaban

F = Jumlah jawaban atau frekuensi

N = Jumlah karyawan/responden

Setelah diketahui jumlah nilai keseluruhan untuk masing-masing variabel di tentukan interval sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai tertinggi-Nilai Terendah}}{\Sigma \text{ Kriteria Pertanyaan}}$$

Keterangan:

NJI = Nilai jenjang interval yaitu untuk menentukan sangat baik, baik, kurang baik, buruk dan sangat buruk.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda, adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

3.3.1 Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Azwar, 2007: 160).

Pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dengan dibantu *Software IBM SPSS Statistics 22*. *Product Moment* bertujuan untuk menguji apakah tiap item atau butir pernyataan benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

Dimana :

r_{xy} : Nilai koefisien korelasi

X : Skor butir

- Y : Skor total
- N : Jumlah responden
- ΣX^2 : Jumlah kuadrat nilai X
- ΣY^2 : Jumlah kuadrat nilai Y

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 2008: 101). Instrumen yang memiliki reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur secara berkali-kali yang menghasilkan data yang sama (konsisten).

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji reliabilitasnya digunakan metode (*split half*) item tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap, kemudian masing-masing kelompok skor tiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total (Sugiyono, 2008: 110),

Untuk menguji reliabilitas ini, dilakukan dengan menghitung *construct reliability* dan *variance extracted* dari masing-masing variabel teramati. Untuk menghitung *construct reliability* dan *variance extracted*, digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum AB - (\sum A)(\sum B)}{\sqrt{\{n \sum A - (\sum A)^2\} \{n \sum B - (\sum B)^2\}}}$$

Koefisien korelasinya dimasukkan ke dalam rumus Spearman

Brown yaitu :

$$r = \frac{2 \times r_b}{1 + r_b}$$

Dimana :

r = nilai reliabilitas

r_b = korelasi product momen antara belahan pertama dan belahan kedua

Setelah dapat nilai reliabilitas instrumen (r_b hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan jumlah responden dan taraf nyata. Bila $r_{hitung} \geq$ dari r_{tabel} , maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel.

3.3.2 Analisis Regresi Berganda

Model regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Variabel Kinerja Pegawai

b_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi ($i = 1, 2, 3$)

X_1 = Variabel diklat

X_2 = Variabel koordinasi organisasi

X_3 = Variabel disiplin

Untuk memudahkan perhitungan diatas, maka penulis menggunakan program *Software IBM SPSS Statistics 22*.

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah, diklat, komunikasi organisasi dan disiplin pegawai masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai.

Uji hipotesa ini dibagi menjadi dua bagian berikut :

1. Uji parsial (uji t)

Pengujian hipotesis dengan distribusi t (*t-student*) adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t sehingga uji statistik (Iqbal Hasan, 2004: 180). Table pengujian disebut *Total t student*. Hasil uji statistic ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) yang dikemukakan. Uji t ini merupakan uji individual yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y yaitu untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X_1, X_2, X_3 terhadap Y secara parsial (individu).

Rumus yang digunakan Y_i

$$t_0 = \frac{bi - Bi}{Sbi}$$

Dimana :

bi : koefisien regresi parsial ke-1

Bi : koefisien regresi berganda

Sbi : kesalahan baku koefisien regresi berganda bi.

Hipotesa yang digunakan dengan jarak nyata $\alpha = 0,05$ yaitu:

Ho₁ = Diklat tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

H₁ = Diklat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

Ho₂ = Komunikasi Organisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

H₂ = Komunikasi Organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

Ho₃ = Disiplin Pegawai tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

H₃ = Disiplin Pegawai berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai

Ho₄ = Diklat, Komunikasi Organisasi dan Disiplin Pegawai tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai

H₄ = Diklat, Komunikasi Organisasi dan Disiplin Pegawai berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai

2. Uji F

Pengujian hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik (Iqbal Hasan, 2004: 39). Tabel pengujian disebut tabel F, hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) yang dikemukakan.

Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji F (Simultan) Dalam Analisis Regresi Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel :

- Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS :

- Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- Jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).